

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pangan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia yang harus terpenuhi setiap waktu. Pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia agar dapat hidup sehat dan juga bekerja secara produktif (Handewi, Rachman, Mewa Ariani 2002). Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Dari tahun 2015 sampai dengan 2025 atau selama sepuluh tahun kedepan diprediksi dengan adanya kondisi global, negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang termasuk juga Indonesia akan menghadapi keadaan dimana semakin sulitnya untuk tercapainya, mempertahankan serta meningkatkan kualitas keberlanjutan

ketahanan pangan (FAO 2011, Badan Ketahanan Pangan 2013, Suryana 2014 dalam Achmad Suryana 2014). Tantangan muncul dari dua sisi yang dimana sisi tersebut saling menguatkan tingkat kesulitannya yaitu dari sisi Supply yang mencakup Penawaran dan pasokan serta sisi Demand yang mencakup permintaan dan kebuuhan yang sangat dinamis.

Ketahanan Pangan yang menjadi isu global yang mana ketahanan pangan sendiri harus mencakup beberapa faktor-faktor diantaranya adalah mencakupnya faktor ketersediaan, faktor distribusi, faktor konsumsi. Faktor ketersediaan pangan itu sendiri memiliki fungsi untuk menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seluruh masyarakat baik dari segi kuantitas, segi kualitas, dan juga segi keragaman serta segi keamanannya. Sedangkan Faktor distribusi mempunyai fungsi untuk mewujudkan sistem distribusi secara efektif serta efisien hal ini dimaksudkan agar menjamin masyarakat untuk memperoleh pangan secara berkelanjutan dan berkecukupan dalam hal jumlah, kualitas serta dengan harga yang cukup terjangkau. Faktor konsumsi memiliki fungsi untuk mengarahkan hal ini dimaksudkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah-kaidah seperti mutu, keragaman, serta kandungan gizi dan keamanan juga kehalalannya secara nasional (Rossi Prabowo:2010). Menurut Bustanul Arifin (2005) dalam Rossi Prabowo (2010) Ketahanan pangan salah satu tantangan yang mendapatkan prioritas guna mencapai kesejahteraan bangsa pada abad millennium ini.

Semakin sempitnya lahan pertanian yang ada di Indonesia maka sulit juga untuk mengharapkan petani-petani kita untuk memproduksi secara optimum,

Tambunan (2003) dalam Rossi Prabowo (2010). Diperkirakan bahwa terjadi konversi lahan pertanian ke non pertanian di wilayah Indonesia semakin hari akan semakin meningkat dengan angka rata-rata 30.000 – 50.000 hektare per tahunnya, Rossita (2002) dalam Tambunan (2003) dalam Rossi Prabowo (2010). Para ahli bersepakat bahwa ketahanan pangan minimal memiliki dua unsur yang sangat pokok, yaitu ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan. Jika salah satu dari kedua unsur pokok tersebut tidak terpenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan atau dikategorikan memiliki ketahanan pangan yang baik, walaupun pangan yang tersedia dikatakan cukup pada tingkat nasional maupun regional, namun apabila akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangan tidak terpenuhi secara merata, maka ketahanan pangan ini juga masih dikatakan rapuh. Ketahanan pangan yang mengandung unsur-unsur ketersediaan pangan dan akses yang baik di masyarakat tersebut bisa lebih luas lagi untuk dijabarkan menjadi ketersediaan secara fisik kuantitasnya, kualitas serta keberlanjutannya untuk tercukupinya kebutuhan konsumsi masyarakat. Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (2013) dalam Achmad Suryana (2014) Sekitar 36% atau sama dengan 2,6 Juta hectare dari total 7,2 juta hektare jaringan irigasi rusak, dalam kondisi ini sudah mampu berpengaruh pada menurunnya kapasitas produksi pangan nasional hal ini dikarenakan produksi pangan di Indonesia yang masih menggunakan basis lahan (Land Base).

Dampak dari perubahan iklim global yang terjadi dalam kurang lebih tiga tahun terakhir yang mengalami kejadian iklim ekstrim di Indonesia yang terasa

lebih nyata, yang dicirikan atau yang mendominasi dari pertanian di Indonesia adalah usaha tani skala kecil dilihat dari data berdasarkan sensus pertanian pada tahun 2013 yang dilakukan oleh BPS, Dikutip dari Direktorat Pangan dan Pertanian, Bappenas, (2013) dalam Achmad Suryana (2014) Jumlah rumah tangga petani berjumlah sebanyak 26,14 juta dengan rata-rata menguasai lahan ,98 hektare dan sekitar 56% atau 14,6 juta rumah tangga rata-rata yang mengusahakan lahan dibawah 0,5 hektare, dan rata-rata pengusahaan lahan petani padi sawah kurang dari 0,2 hektare. Para petani kecil dihadapkan dengan masalah-masalah yang sampai saat ini belum berhasil diatasi dengan cara yang baik diantaranya seperti keterbatasan akses terhadap pasar, permodalan, informasi dan juga teknologi (Suswono 2013 dalam Achamd Suryana 2014).

Pemerintah melakukan upaya-upaya agar pangan di Indonesia sesuai dengan unsur penting terhadap ketahanan pangan seperti yang sudah disebutkan diatas yaitu unsur ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat, oleh sebab itu pemerintah mengadakan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI). Program ini juga mendukung faktor distribusi dalam mewujudkan ketahan pangan seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa faktor distribusi sendiri memiliki fungsi untuk mewujudkan sistem distribusi secara efektif dan efisien bertujuan untuk menjamin masyarakat untuk memperoleh pangan secara berkelanjutan dan berkecukupan dalam hal jumlah, kualitas serta dengan harga yang cukup terjangkau.

Menurut Badan Ketahanan Pangan dan Kementerian Pertanian indikator strategis harga dan pasokan pangan yang saling terkait umumnya digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan, permasalahan yang disebabkan oleh rantai distribusi pangan, ketidakcukupan pasokan pangan disuatu wilayah.

Masalah utama yang terjadi adalah masih tingginya disparitas harga antara produsen dan juga konsumen yang berakibat keuntungan menjadi tidak proporsional antar pelaku usaha, selain itu harga yang masih cukup tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani yang juga sebagai produsen mendapatkan harga yang layak maka dari itu perlu adanya keseimbangan harga antara produsen dan konsumen yang saling menguntungkan, menurut Badan Ketahanan Pangan dan Kementerian Pertanian program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia ini sebagai solusi permanen dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi salah satunya adalah disparitas harga pangan, program ini juga dilakukan untuk mengupayakan stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis dan efisien, rantai distribusi pemasaran dengan memperpendek rantai pasok tersebut.

Program PUPM sendiri secara tidak langsung memiliki peran dalam mengatasi anjloknya harga pada musim panen raya dan melonjaknya harga pada musim paceklik dan menjadi instrument yang dibuat pemerintah untuk menahan gejolak harga pada saat suplai melimpah maupun pada saat suplai berkurang. Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) merupakan kegiatan/program untuk pemberdayaan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM), yang dimaksudkan dengan LUPM sendiri disini terdiri atas Gabungan

Kelompok Tani, Kelompok Tani, dan juga lembaga usaha masyarakat yang bergerak dibidang pangan dan juga industry/produsen/distributor bahan-bahan pangan, LUPM menjalankan tugas untuk melayani mitra pemasaran yaitu Toko Tani Indonesia (TTI) dalam bentuk toko/warung/kios atau pedagang komoditas pangan (Sarastuti 2018).

PUPM melalui LUPM atau Gabungan Kelompok Tani serta TTI yang diberdayakan untuk menjalankan fungsi sebagai lembaga distribusi dalam rantai distribusi yang bertujuan untuk lebih efisien dan mengurangi disparitas harga antar produsen dan konsumen (Zakia, Azaria 2017). Program kegiatan yang diluncurkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan kementerian Pertanian ini juga juga memiliki fungsi untuk tetap menyerap produk pertanian dengan harga yang menguntungkan petani dan mendukung kestabilan pasokan dan raga pangan pokok strategis serta melakukan pemotongan rantai pasok bahan pangan agar menjadi lebih pendek dan keuntungan yang diperoleh masing-masing rantai menjadi lebih adil (Novita Dini Muharsih, Dr. Nunuk Dwi Retnandari, MS 2019).

Menurut Sarastuti (2018) tercatat bahwa pada tahun 2016 terdapat sebanyak 429 LUPM yang menerima manfaat lalu pada 2017 406 LUPM, pada setiap provinsi LUPM memasok komoditas bahan-bahan pangan yang berbeda diantaranya seperti Sumatera selatan memasok beras, Lampung memasok beras, Banten memasok beras, cabai merah, dan bawang merah, Jawa barat memasok beras, cabai merah, dan bawang merah, Jawa tengah memasok beras, cabai merah, dan juga bawang merah, Jawa timur memasok beras, cabai merah, dan

bawang merah, dan Nusa Tenggara Barat hanya memasok bawang merah. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat atau LUPM sendiri telah memasok bahan pangan ke kurang lebih 2000 Toko Tani Indonesia (TTI) yang berada di kabupaten dan kota di 32 provinsi yang mengalami masalah ketidakstabilan pasokan dan harga-harga pangan pokok dan strategis (Kementan 2017a,2018).

Kabupaten Brebes terletak di ujung barat Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes sendiri memiliki tiga kategori wilayah diantaranya adalah daerah pantai yang terletak dibagian utara, daerah dataran landai serta bergeombang dibagian tengah dan daerah dengan dataran yang lebih tinggi dibagian selatan. Di bagian utara Kabupaten Brebes sendiri memiliki potensi sumberdaya alam unggulan pada bidang pertanian salah satu yang menjadi unggulan adalah bawang merah dan padi.

Melihat sektor pertanian merupakan potensi sumberdaya alam unggulan di bagian utara Kabupaten Brebes, selain komoditi unggulan bawang merah di Kabupaten Brebes juga terdapat komoditi bahan pangan lainnya seperti padi. Hal ini menarik untuk diteliti karena padi dan bawang merah merupakan produk yang dimasukan ke dalam Toko Tani Indonesia yang juga bagian dari program PUPM, harga bawang merah dan padi serta komoditas harga pangan yang lain seringkali tidak stabil serta distribusi yang merupakan aspek dari ketahanan pangan itu sendiri seringkali terkendala akibatnya akan berpengaruh kepada ketahanan pangan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan untuk rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi program PUPM melalui toko tani Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Brebes tahun 2019?
2. Bagaimana dampak program PUPM melalui Toko Tani Indonesia terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Brebes tahun 2019?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis proses monitoring dan evaluasi program PUPM melalui Toko Tani Indonesia dalam meningkatkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Brebes Tahun 2019.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan dan kontribusi mengenai teori sebagai referensi untuk penelitian lain, baik itu untuk pembaca maupun untuk penulisnya yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia dalam meningkatkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Brebes Tahun 2019. Serta



memberikan informasi mengenai kendala dalam Monitoring dan Evaluasi dan Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) tersebut serta penelitian ini sebagai masukan dan referensi kepada pihak-pihak yang terkait dalam program ini.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk program terkait, dan untuk mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan dan mengetahui bagaimana proses Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Usaha Pangan masyarakat di Kabupaten Brebes dengan tujuan agar pihak yang terkait dengan program tersebut dapat menjalankan program dengan lebih baik. Dan hasil penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat berupa pemikiran dan informasi untuk penulis, pembaca, pihak yang diteliti dan penelitian selanjutnya.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian yang ditulis ini menggunakan beberapa literatur review yang merujuk pada jurnal yang berbeda-beda pada penelitian terdahulu.

**Tabel 1**  
**Tinjauan Pustaka**

PENULIS	JUDUL	HASIL TEMUAN
Rimadianti, dkk (2016)	Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan	Penelitian ini merumuskan strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Harga pangan di wilayah tersebut sudah cukup dan stabil dilihat dari meningkatnya

		keragaman harga dan kualitas konsumsi pangan hal ini karena wilayah tersebut strategis untuk akses pangan terhadap daerah sekitar dan komitmen kepala daerah yang kuat. Kerja sama triple helix juga menjadi alternative solusi yaitu kerjasama antara pemerintah, swasta, lembaga pendidikan dan penelitian.
Faqih, dkk (2016)	Hubungan Program Lumbung Pangan Padi dengan Ketahanan Pangan Keluarga (Kasus di Kelompok Lumbung Pangan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon)	Ada hubungan kuat antara partisipasi anggota kelompok dalam program lumbung pangan padi dengan ketahanan pangan keluarga dengan nilai yang tinggi, dengan semakin tingginya angka tersebut maka akan diikuti dengan semakin baiknya ketahanan pangan keluarga. Hubungan antara keswadayaan anggota kelompok dalam program ini juga berpengaruh, semakin tinggi tingkat keswadayaan anggota kelompok dalam program ini maka semakin baiknya ketahanan pangan keluarga, hubungan kemitraan anggota kelompok dalam program ini juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan anggota keluarga dengan semakin baiknya ketahanan pangan tersebut.
Nainggolan (2016)	Ketahanan dan Stabilitas Pasokan, Permintaan, dan Harga Komoditas Pangan	Kemandirian pangan di tingkat rumah tangga perlu mendapat perhatian cukup serius dimasa mendatang karena kemandirian pangan rumah tangga adalah fondasi untuk ketahanan pangan wilayah dan nasional. Berbagai kebijakan strategi, program sudah dirumuskan dengan baik pada masa lalu namun belum terlaksana secara efektif, masalahnya terletak pada komitmen dan kedisiplinan masing-masing stakeholders untuk mendalakan tugasnya dengan benar dan untuk tujuan bersama. Masalah lainya seperti perluasan kepemilikan lahan, KK, infrastruktur pedesaan kendala ini perlu dukungan anggaran yang tidak harus dari Departemen

		Pertanian tetapi bisa dari institusi yang mendukung pertanian tersebut.
Widjojo (2016)	Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat Dalam Mendukung Kedaulatan Pangan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Produktivitas padi di sawah wilayah Provinsi Jawa Barat tergolong tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, sedangkan lahan sawah cenderung menyusut dan masih ada empat wilayah di Provinsi Jawa Barat yang terdeteksi rawan pangan, kesiapan Provinsi Jawa Barat bisa terganggu apabila perubahan iklim global dan konversi lahan sawah untuk penggunaan lain. Perlu ada kolaborasi antara pemerintah dan rakyat untuk meningkatkan hasil dan mutu pertanian dengan pemanfaatan teknologi berbasis agroindustry, agrobisnis dan pengolahan hutan. Pemerintah diminta menargetkan pengendalian impor pangan dengan meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri dan pemberantasan mafia impor, mengembangkan ekspor pertanian berbasis pada pengolahan pertanian.
Arbi, Sriati (2017)	Analisis Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan dalam Program Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan	Penelitian ini mendeskripsikan kinerja PPL di wilayah tersebut dan mengukur kinerja PPL pada program LDPM, mengetahui keberhasilan program LDPM dan kinerja PPL terhadap keberhasilan program. Dengan kesimpulan kinerja PPL di wilayah tersebut termasuk dalam kriteria cukup. Tingkat keberhasilan program LDPM di wilayah tersebut dalam kriteria tinggi dan tentunya kriteria tersebut berpengaruh pada keberhasilan program LDPM di wilayah tersebut.
Wijaya GC, dkk (2016)	Evaluasi Pelaksanaan Program Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) pada Gapoktan di Kabupaten Tabanan (Studi Gapoktan Aseman III di Desa Meganti)	Penelitian ini menggambarkan tentang identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program LDPM. Efektivitas program PUMP dinilai cukup baik artinya program LDPM berjalan dengan efektif dilihat dari indikator kesejahteraan petani di Gapoktan tersebut. Kelemahan

		program tersebut adalah dana bantuan sosial yang kurang, kurangnya sosialisasi, pupuk dan obat-obatan.
Darwis, dkk (2016)	Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Sinergi Program PUAP dengan Desa Mandiri Pangan	Penelitian ini menjerlaskan program pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan, masih ada kendala untuk mengatasi permasalahan yang terjadi maka diperlukan kordinasi dengan sinergi data untuk desa yang menerima program, penataan kelembagaan internal dan infrastruktur. Demapan dikategorikan dalam salah satu program yang akan mensukseskan program PUAP, maka diperlukan kordinasi kegiatan yg baik, pembangunan lintas sectoral, peningkatan peran pemerintah, swasta, LSM.
Santoso, dkk (2016)	Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat desa Melalui Sinergi Program PUAP, Gapoktan dan Desa Mandiri Pangan (Studi kasus di Beberapa desa di Kabupaten Grobogan)	Dibutuhkan waktu untuk memantapkan eksistensi kelompok terkait dengan kelembagaan yang saranya adalah pemberdayaan masyarakat miskin dengan menumbuhkan ekonomi pedesaan, mensinergikan program PUAP, desa mandiri pangan di beberapa desa di wilayah tersebut adalah usaha yang dilaksanakan guna menyelesaikan masalah tersebut. Program tersebut dibawah kendali Badan Ketahan Pangan, evaluasi dan monitoring terkait penggunaan dan PUAP dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian. Dana tersebut digunakan untuk memfasilitasi desa binaan dengan tujuan pemantapan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Demapan dikategorikan program yang membantu PUAP dengan menjalankan program yang ada di desa terkait demapan.
Hardono (2014)	Strategi Pengembangan Disversifikasi Pangan Lokal	Terjadi penurunan konsumsi pangan lokal termasuk pada wilayah yang sebelumnya mempunyai pola pangan

		<p>pokok berbasis pangan lokal. Pengembangan diversifikasi pangan sebagai bagian mewujudkan kedaulatan pangan hendaknya dilakukan oleh semua kalangan dengan cara menyusun dan implementasi strategi kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan potensi lahan dan kebiasaan mengkonsumsi pangan lokal. Hal lain harus dilakukan seperti pengembangan teknologi pengolahan pangan, menelaraskan kebijakan produksi industri pangan dengan kebijakan konsumsi pangan, promosi pangan lokal sehat komprehensif. Penciptaan pasar pangan lokal sendiri tingkat nasional dan wilayah diikuti ketersediaan produk pangan lokal yang bisa bersaing dengan produk asing.</p>
Elizabeth (2018)	Strategi Pencapaian Diversifikasi dan Kemandirian Pangan: Antara Harapan dan Kenyataan.	<p>Ada beberapa faktor untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional diantaranya: meningkatnya produksi pangan domestic sumberdaya lokal, meningkatnya land man ratio dengan penetapan lahan abadi irigasi dan kering, meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan cadangan makanan. Meningkatkan kemampuan jangkauan distribusi pangan produsen dan konsumen, meningkatkan kemampuan pemerintah dalamantisipasi dan tanggap sejak dini pada masalah kerawanan pangan dan gizi. Diversifikasi untuk mengubah pola pangan masyarakat agar lebih beragam dan gizi seimbang dan aman. Diversifikasi bisa tercapai dengan perangkat kebijakan, teknologi informasi, fungsi lembaga penyuluhan, pemasaran dan sistem pendekatan dari instansi terkait dengan fokus terhadap petani.</p>
Sandyatma, dkk (2012)	Partisipasi Anggota Kelompok Tani dalam Menunjang Efektivitas Gapoktan pada Kegiatan	<p>Pengimplementasian kegiatan penguatan LDPM di wilayah tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal, dilihat dari rendahnya tingkat</p>

	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Kabupaten Bogor	partisipasi anggota Gapoktan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pemanfaatan hasil. Faktor pendapatang menjadi pengaruh positif terhadap partisipasi anggota dalam kegiatan ini, faktor motivasi dan intensitas menerima sosialisasi kegiatan sama berpengaruh positifnya terhadap partisipasi anggota Gapoktan. Usia menjadi pengaruh negative terhadap tingkat partisipasi, sosialisasi lebih efektif jika diberikan kepada Gapoktan yang berusia dibawah 50 tahun sedangkan Gapoktan berusia diatas 50 tahun disarankan untuk mengikuti program yang cocok bagi mereka. Partisipasi anggota Gapoktan dalam kegiatan ini memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas Gapoktan tapi dalam pengembangan belum optimal Karena tidak semua anggota dapat menerima, minimnya sumberdaya manusia yang mengelola dilihat dari kepemimpinan Gapoktan yang lebih dari 3 periode memimpin Gapoktan.
Sriati, dkk (2017)	Partisipasi Petani dan Efektivitas Gapoktan dalam Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat LDPM di Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin.	Penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat partisipasi petani dalam program tersebut secara menyeluruh dalam kategori sedang, pada partisipasi tahap perencanaan dalam kategori rendah, pada tahap pemantauan dan evaluasi dalam kategori sedang dan pada tahap keberhasilan (efektivitas) Gapoktan pada penguatan program LDPM dilihat dari indikator hasil, dampak, manfaat seara keseluruhan indikator dalam kategori yang tinggi, kecuali indikator manfaat yang rendah dan hubungan positif antara tingkat partisipasi Gapoktan dengan efektivitas Gapoktan pada program tersebut semakin tinggi.
Al Maqfiah, dkk (2019)	Evaluasi Peranan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Peranan LDPM dalam mengatasi rendahnya nilai tawar gabah anggota Gapoktan dengan memberikan harga

	Terhadap Harga Beras	Netralisasi	pembelian yang stabil hingga akhir panen. Peran LDPM untuk mengatasi nilai tambah gabah Gapoktan dengan memberikan fasilitas sarana prasarana untuk penyimpanan berupa gudang saat panen raya dan masa paceklik. Untuk modal yang terbatas Gapoktan difasilitasi dengan penguatan modal melalui kegiatan LDPM.
Saliman, dkk (2013)	Evaluasi Lembaga Pangan (LDPM) Ketersediaan Masyarakat.	Penyaluran Distribusi Masyarakat terhadap Pangan	Gapoktan penerima dana LDPM yang diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu utara dengan persyaratan Gapoktan sudah berpengalaman mengelola dana BLM. Pengelolaan dana LDPM dapat dikelola secara baik dan mampu menjamin ketersediaan pangan pada sepanjang musim hal ini dibuktikan dengan tersedianya stok gabah pada gudang Gapoktan.
Anugrah, dkk (2019)	Toko Tani Indonesia: National Program for Shortering Rice Supply Chain		Toko Tani Indonesia merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperkecil rantai pasokan pangan, guna mencapai pasokan pangan yang stabil dan harga sembako yang stabil. Indikator pencapaian sudah ditentukan oleh Kementrian Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dilihat dari dari indikator supply chain, stabilitas pasokan dan harga, akses kemudahan, strategi kinerja TTI. Toko Tani Indonesia telah sukses memperkecil rantai pasok pangan, kontribusi beras di TTI tidak mempengaruhi stabilitas pasokan dan harga pasar, selain itu konsumen belum memiliki akses untuk memperoleh beras dari TTI. Strategi dalam meningkatkan kinerja TTI dengan meningkatkan manajemen internal, melakukan pendaan kepada LUPM agar terus berjalan karena LUPM merupakan pemasok beras kepada TTI secara berkala dan merancang kriteria konsumen agar TTI bisa diakses oleh masyarakat luas.

Anggraini, dkk (2019)	Partisipasi Petani dan Keberhasilan Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan	Tingkat partisipasi program PUPM di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan secara menyeluruh termasuk dalam klasifikasi yang rendah, dilihat dalam hal perencanaan yang masuk dalam kategori rendah, dalam hal pelaksanaan dalam kategori tinggi, dalam hal pemantauan dan evaluasi dalam kategori rendah, dalam hal pemanfaatan hasil dalam kategori tinggi. Faktor yang mempengaruhi partisipasi petani sendiri adalah tingkat pengetahuan petani tentang program tersebut serta frekuensi komunikasi pada program tersebut, selain itu faktor kekosmopolitan petani. Faktor lain yang tidak berhubungan nyata dengan partisipasi program diantaranya adalah jumlah anggota keluarga dan motivasi dengan kesimpulan ada hubungan yang nyata antara partisipasi petani dengan keberhasilan Program PUPM.
Silalahi, dkk (2019)	Government Policy Statements Related To Rice Problems In Indonesia : Review	Pemerintah melalui Bulog mengendalikan stok beras dan harga dari produsen dengan melihat instrument harga, program PUPM dari pemerintah meluncurkan Toko Tani Indonesia untuk menjual bahan makanan yang murah sebagai solusi yang disebabkan oleh panjangnya rantai pasok pangan dengan menetapkan HPP dan HET. Namun kebijakan pemerintah dengan menetapkan HPP dan HET masih belum optimal, kebijakan pemerintah belum menyeimbangkan antara kelompok tani besar dan kecil. Pemerintah dianggap masih belum memahami proses dalam produksi beras sehingga beberapa kebijakan kurang cocok, pemerintah disarankan untuk survei langsung ke lapangan dan mencari referensi untuk solusi dari negara tetangga yang terkait dengan regulasi beras bertujuan efektivitas serta menguntungkan petani.



Wahyuningsih, dkk (2019)	Keuntungan Usaha Tani Melalui Kemitraan Petani Padi Dengan Toko Tani di Desa Tambakboyo Kecamatan Ambarawa, Semarang	Terdapat perbedaan keuntungan usaha tani antara petani sistem mitra dan non mitra, faktor yang mempengaruhi keuntungan petani sistem mitra dengan toko tani diantaranya adalah upah pekerja, harga pestisida, pajak, alat pertanian dan faktor yang tidak mempengaruhi keuntungan yaitu harga benih dan pupuk. Faktor pengaruh keuntungan petani non mitra yaitu upah pekerja, harga benih, pupuk, pajak lahan, sedangkan faktor yang tidak mempengaruhi keuntungan petani non mitra adalah alat pertanian. Keuntungan usaha tani dengan sistem mitra lebih tinggi dibandingkan non mitra maka dari itu petani diharapkan bisa melakukan kemitraan dengan Toko Tani agar meningkatkan keuntungan.
Sarastuti, dkk (2018)	Analisis Mutu Beras dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Dalam Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	Penelitian ini mengidentifikasi kelas mutu beras yang dihasilkan oleh Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) dan evaluasi pascapanen. Dari penelitian ini enam beras yang telah diproduksi oleh responden tidak ada yg memenuhi persyaratan kelas mutu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian No.31/permentan/PP.130/8/2017. Hal ini disebabkan oleh ruang penyimpan gabah lembab dan tidak menggunakan alas serta pengering dan penggiling secara subyektif dan teknologi yang masih sederhana.
Rendra (2018)	Modal Sosial Dalam Implementasi Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Modal sosial yang digunakan oleh implementor untuk mengimplementasikan program penguatan LDPM sangat membantu kelancaran pelaksanaannya. Terutama manfaat semangat kerjasama, gotong royong, solidaritas yang cukup tinggi dan juga merasa senasib dan sepenanggungan yang ada antara kalangan Gapoktan Sumber Rezeki di desa tersebut. Dalam aspek tim teknis,

		PPL dan kelompok sasaran terkait terdapat peran tokoh masyarakat yang dominan, peran ketua Gapoktan dinilai sangat sentral dalam menjalankan kegiatan ini dengan kata lain bahwa modal sosial trust lebih banyak digunakan dibandingkan modal sosial lain.
Rahmawati (2012)	Aspek Distribusi Pada Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Tapin	Ada enam saluran distribusi beras di wilayah tersebut, tiga saluran akhir distribusi beras terdapat LUEP sebagai salah satu lembaga pemasaran. Adanya dana bantuan dari pemerintah untuk gabah petani peran LUEP menjadi dominan dalam pendistribusian gabah dan beras. Marjin terbesar saluran distribusi beras wilayah Kabupaten Tapin terjadi di lembaga pemasaran pedagang grosir dan pengecer lokal, keuntungan terbesar diperoleh dari pengecer lokal. Bisa dilihat dari sini bahwa pedagang pengecer sebagai rantai pemasaran akhir menerima keuntungan tertinggi dibanding lembaga lain yang memasarkan distribusi beras di wilayah Kabupaten Tapin.
Kosasih, dkk (2014)	Komunikasi Organisasi Dalam Pengembangan Kinerja Pengurus Gapoktan Pada Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Kasus Pada Gapoktan di Kabupaten Subang dan Kabupaten Bogor)	Pengurus Gapoktan umumnya berusia produktif, tingkat pendidikan formal para pengurus umumnya lulusan Sekolah Dasar dan tingkat pendidikan non-formal sebagian besar pengurus pada kategori yang tinggi, mayoritas pengurus tidak pernah mengikuti organisasi lain. Rata-rata gapoktan memiliki iklim komunikasi tinggi dan memiliki suasana baik untuk pengurus Gapoktan, kepuasan komunikasi tergolong cukup tinggi disebagian besar pengurus Gapoktan dan memberikan informasi yang cukup dari pengurus Gapoktan. Terlihat hubungan yang nyata dilihat antara komunikasi organisasi untuk pengembangan kinerja pengurus Gapoktan dengan

		iklim komunikasi dan hubungan nyata dilihat dari kepuasan komunikasi.
Ruauw (2015)	Kajian Distribusi Pangan Pokok Beras di Kabupaten Kepulauan Talaud	Distribusi beras giling yang berada diwilayah tersebut hanya melibatkan satu pola dan melibatkan beberapa lembaga pemasaran yaitu pedagang, pengumpul desa, pedagang besar berada di Kota Manado dan pedagang pengecer di Kota Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud. Beras kemasan dari Surabaya melibatkan lembaga pemasaran distributor di Kota Manado. Besarnya farmer's share pada pemasaran beras giling di Kabupaten Talaud sebesar 73,68% harga tingkat petani Rp.7000/kg, harga tingkat konsumen Rp.95000/kg. rasio keuntungan biaya lembaga pemasaran pemasaran pedagang, pengumpul desa cukup besar dibanding pedagang pedagang di Kota Manado dan pedagang pengecer di Kota Lirung. Rasio keuntungan biaya terendah terjadi di lembaga pemasaran pedagang besar di Kota Manado.
Siregar, dkk (2013)	Peranan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) terhadap Peningkatan Pendapatan Petani	Program PUAP memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat dalam hal permodalan dan evaluasi. Pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan di Kuta Jeumpa masih dalam bentuk Gapoktan belum berkembang menjadi LKM. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan yaitu BLM PUAP bimbingan penyuluhan dan pembayaran pinjaman BLM PUAP sangat berpengaruh terhadap sikap petani dan program PUAP sendiri diketahui memberikan peningkatan pada bidang pendapatan petani yang meningkat sebesar 0,16%.
Hermawan, dkk (2012)	Peran Bantuan Langsung Masyarakat melalui PUAP Terhadap Struktur Pembiayaan dan Pendapatan Usaha Tani	Peran Bantuan Langsung Masyarakat PUAP mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing juga ekspor untuk produk pertanian, adapun kegiatan usaha tani yang dijalankan yang mampu

		menambah pendapatan yang lebih menguntungkan tetapi struktur pembiayaan usaha tani kakao yang diterima relative kecil dari total dana BLM PUAP yang diterima namun tetap memberikan dampak positive. Dana BLM PUAP digunakan untuk tambahan modal usaha tani guna meningkatkan produktivitas usaha tani dan pendapatan petani. Hal ini layak untuk dilanjutkan tetapi masih perlu peningkatan dalam hal alokasi dana agar dampaknya semakin besar.
Santosa, dkk (2017)	Tata Kelola Kelompok Tani sebagai Pendukung Pengembangan Sektor	Tidak seluruhnya petani di Provinsi Jawa Tengah tergabung dalam kelompok tani dan menerapkan sistem pembiayaan syariah melalui BMT, KSP pinjaman syariah memberi dampak positif terhadap perkembangan usaha pertanian kelompok tani. Jumlah kelompok tani pada 2016-2017 berjumlah 128 penerapan kelembagaan ini berdampak positif kepada kelompok tani dan akan mempermudah pemerintah pusat untuk memantau mengkordinasikan sektor pertanian dalam pengembangan sektor pertanian disetiap daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa. Beberapa kelompok petani di Jawa Tengah memberikan dampak positif berupa pembiayaan syariah dengan ini bisa meminimalisir kerugian pada masa panen dan menerapkan akad musyarakah, memperoleh kemudahan untuk memenuhi sarana prasarana pertanian. Petani juga memperoleh bantuan dari LKMS yaitu BMT dan koperasi berupa penyediaan benih, perbaikan alat pertanian dengan harga sesuai dengan kemampuan petani.
Nunes (2015)	Strategi Pengembangan Usaha Tani Sayuran Berorientasi Pasar Modern (Studi Kasus Kelompok Tani Liudiak	Teridentifikasinya kekuatan pola komunikasi yang insentif antar petani anggota Gapoktan kemudian petani memiliki lahan sendiri dan produk sayuran yang berkualitas dan adanya

	Desa Liurai Distrik Aileu Timor Leste)	kepastian kepastian pasar dengan kontrak farming dengan supermarket. Kelemahan ada pada tingkat pendidikan dan pengalaman berusaha tani masih dalam kategori rendah, kelembagaan Gapoktan yang lemah, modal usaha sarana prasaran dalam angka kecil, teknologi produksi sangat sederhana. Pola belanja masyarakat menjadi peluang yang cenderung membeli di supermarket, namun hal yang menjadi ancaman adalah naiknya harga barang menjadikan input produksi merupakan produk impor, lembaga keuangan belum bersedia memberikan pinjaman khusus kepada petani, banyaknya sayuran impor, infrastruktur yang belum baik.
Rachman, dkk (2016)	Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pada Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog	Melakukan cadangan pangan kolektif dengan membangun lumbung pangan dengan cara sosialisasi memberikan sebuah pemahaman dan melakukan program pemberdayaan yang sifatnya stimulant dengan aksi program revitalisasi lumbung pangan masyarakat oleh Departemen Pertanian untuk mencapai sasaran yang rata. Struktur pengembangan cadangan pangan pemerintah dengan cara pembagian peran, pemerintah sebagai pengelola cadangan pangan beras dan non beras, mempertahankan sistem sentralistik untuk pengelolaan cadangan pangan, pemerintah pusat sebagai pengelola stok operasi, penyangga, line stok. Peran pemerintah daerah sebagai pengelola reserve sok untuk keadaan darurat menggunakan pendekatan desentralisasi bukan terpusat untuk mekanisme penyalur stok beras usulan ini untuk efisiensi dengan pengurangan koordinasi, pemotongan jalur birokrasi pendistribusian, tugas wewenang dan pendistribusian beban biaya antar pemerintah pusat dan daerah.

<p>Tim peneliti pusat kebijakan perdagangan dalam negeri dan pengkajian dan pengembangan kebijakan perdagangan Kementerian Perdagangan (2013)</p>	<p>Laporan Akhir Analisa Dinamika Konsumsi Pangan Masyarakat Indonesia</p>	<p>Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan pangsa pengeluaran di perkotaan, pedesaan semakin membaik, terdapat pola perubahan pengeluaran masyarakat dari padi-padian ke makanan dan minuman jadi. Pola konsumsi masyarakat mengarah pada pola konsumsi yang baik dari segi energy, protein tapi keragaman konsumsi perlu ditingkatkan lagi. Dampak dari peningkatan pendapatan perubahan pola konsumsi pangan adalah mengurangi sumber karbohidrat dan meningkatkan sumber protein, vitamin, mineral ini dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat tentang pangan dan gizi. Secara keseluruhan permintaan pangan pada 2020 masih tinggi pada kalangan menengah yang jumlahnya lebih besar.</p>
<p>LN Tanjung, D Mutiarin, EP Purnomo (2018)</p>	<p>Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017</p>	<p>Monitoring dan Evaluasi dana keisimewaan DIY tahun 2013-2017 sesuai dengan teori Ten Steps to a Result Based Monitoring and Evaluation Sistem, teori tersebut dapat menjadi panduan dalam menjalankan monitoring dan evaluasi yang selanjutnya dan memberikan nilai yang berguna. Dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana keistimewaan langkah pertama yaitu SKPD terkait menyiapkan rencana monitoring, kemudian SKPD terakit menyusun indicator Pemanfaatan dana keistimewaan, selanjutnya SKPD terkait menyusun data pemanfaatan dana keistimewaan dan menyusun target pemanfaatan dana keistimewaan, selanjutnya SKPD terkait melakukan Evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan dan menyusun laporan pemanfaatan dana keistimewaan serta menyusun rencana perbaikan dan feedback dari pemanfaatan dana keistimewaan kemudian SKPD terkait menyusun</p>

		program secara berkelanjutan berbasis pemanfaatan dana kesitimewaan. Hasil dari penelitian dan temuan di lapangan selanjutnya di padukan dengan teori Ten Steps to a Result Based Monitoring and Evaluation Sistem.
--	--	---

Dari keseluruhan penelitian yang telah dijabarkan diatas, bahwa topik serta fokus dan juga bahasanya berbeda-beda akan tetapi penelitian-penelitian diatas menekankan pada ketahanan pangan, solusi serta analisis dalam kemudahan masyarakat untuk mengakses bahan pokok pangan dan menjaga agar harga tetap stabil serta efisiensi dalam distribusi pangan dan inovasi dan evaluasi dalam pemasaran bahan pangan pokok itu sendiri, baik pada lembaga pemerintahan terkait maupun pihak-pihak yang terlibat dalam produksi sampai pendistribusian bahan pokok pangan yang nantinya sampai ke konsumen atau masyarakat.

## **F. Kerangka Teori**

Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konsep dan definisi serta proporsi yang mengemukakan pandangan secara sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi hubungan diantara variable, untuk menjelaskan dan juga meramalkan gejala tersebut (Rakhmat 2004:6). Teori sendiri berguna untuk menjadikan titik tolak dan juga landaan berfikir dalam memecahkan dan menyoroiti sebuah permasalahan dan teori itu sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi serta menemumakn

keterkaitan dengan fakta-fakta yang ada secara sistematis (Effendy 2004:224).

## **1. Monitoring dan Evaluasi**

### **a. Definisi Monitoring Dan Evaluasi**

Sedangkan Monitoring dan Evaluasi Menurut Drs. Ag. Subarsono, Msi, M.A dalam Papatungan, A. P & Rindengan, Y. D. Y 2017. Monitoring merupakan aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan juga akibat dari sebuah kebijakan yang sedang dilaksanakan. Sedangkan Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai tingkat kerja suatu kebijakan, Evaluasi sendiri baru dapat dilaksanakan jika suatu kebijakan sudah berjalan dengan cukup waktu.

Monitoring menurut Suryana 2012:2 dalam Astuti, Anisa Puji 2018. Monitoring adalah kegiatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu program dan kebijakan yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan rencana, serta untuk mengetahui bagaimana hambatan yang ada dan pelaksana program mengambil langkah untuk menyelesaikan serta mengatasi hambatan tersebut. Dari keseluruhan dalam proses implementasi, monitoring merupakan sebuah alat pengendali yang baik, monitoring dilaksanakan terhadap hasil dari perencanaan yang sedang dijalankan. Monitoring terhadap hasil perencanaan yang sedang berjalan menjadikan alat pengendali yang baik untuk proses implementasi.



Evaluasi menurut Dunn Dalam Suryana 2010:3 dalam Astuti, Anisa Puji 2018. Evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang berhubungan dekat dengan monitoring, karena data yang dihasilkan dari proses monitoring bisa digunakan dalam proses evaluasi. Evaluasi sendiri merupakan bagian dari suatu perencanaan kegiatan hingga kegiatan tersebut dapat dikatakan lengkap jika sudah masuk pada proses evaluasi selain itu dapat digunakan sebagai control dan pengendalian ketercapaian tujuan. Evaluasi sendiri sering disebut dengan penilaian, pemberian angka dan juga penafsiran. Evaluasi berkaitan dengan pemberian pandangan tentang manfaat dari suatu kebijakan dan juga berkaitan dengan hasil informasi berupa nilai.

Monitoring dan Evaluasi Menurut Weiss dalam Mulyono 2007:224 dalam Astuti, Anisa Puji 2018. Monitoring dan Evaluasi merupakan suatu proses yang digunakan untuk menilai sudah sejauh mana implementasi kegiatan atau proyek, sudah sesuai rencana yang sudah ditetapkan atau belum. Selain itu Monitoring dan Evaluasi juga digunakan sebagai penentu intervensi yang harus dilakukan untuk memaksimalkan dampak dari kegiatan atau proyek yang berjalan lalu secara praktis, Monitoring dan Evaluasi dipergunakan untuk mengetahui bagaimana sumber daya sudah digunakan secara tepat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan apakah proses yang digunakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan serta untuk mengukur pencapaian sebuah target dan juga sasaran.

Definisi Monitoring dan Evaluasi menurut Ojha dalam Muktiali 2009:12 dalam Astuti, Anisa Puji 2018. Mendefinisikan Monev sebagai suatu kegiatan yang prosesnya berkesinambungan dan terdiri dari pengumpulan data, proses dan pemilihan informasi yang terkait dengan penerapan proyek, progress dari proyek atau program tersebut serta efek dan dampak dari proyek atau program tersebut.

#### b. Prinsip Monitoring dan Evaluasi

**Tabel 2**  
**Prinsip Monitoring dan Evaluasi**

Tristanto. C. 2018	<p>Berorientasi kepada tujuan program itu sendiri. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengacu pada tujuan yang ingin tercapai. Hasil dari Monitoring dan Evaluasi sendiri digunakan sebagai bahan dan gambaran untuk perbaikan dan peningkatan program dengan evaluasi formatif dan juga membuat justifikasi dan akuntabilitas pada evaluasi sumatif.</p> <p>Mengacu kepada asas manfaat, sudah seharusnya Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan maaf yang cukup jelas. Manfaat tersebut bisa berupa saran, masukan ataupun rekomendasi untuk perbaikan program yang di Monitoring dan Evaluasi ataupun program yang sejenis di waktu yang akan datang.</p> <p>Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara objektif. Petugas monitoring dan Evaluasi berasal dari pihak eksternal yang seharusnya bersifat independen, bebas dari pengaruh pihak-pihak yang melaksanakan program selain itu petugas Monitoring dan Evaluasi yang berasal dari internal harus bertindak objektif dengan melaporkan temuan secara apa adanya.</p>
ANSSP (Aceh Nias Settlements Support Programme) Vol. 6 dalam Muktiali 2009:13.	Berdasarkan kepada standar yang telah diketahui bersama yaitu Monitoring dan Evaluasi harus dilakukan dengan sesuai standar, indikator dan acuan dari segi keberhasilan, kegagalan, ketepatan dan kesalahan yang sudah ditetapkan dan diketahui bersama. Maka dari itu sebelum sebuah program dijalankan perlu untuk diterbitkan dan dipublikasikan standar, indikator dan acuan tersebut.

	<p>Terbuka kepada pihak-pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi yang juga sebagai subjek dan pihak yang dimonitoring dan evaluasi yang juga sebagai objek harus sama-sama mengerti tentang kegiatan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan. Selain itu pihak dari luar juga diperbolehkan untuk mengetahui kegiatan monev akan tetapi tetap berdasarkan dengan standar, indikator serta acuan yang sudah ditetapkan.</p>
	<p>Adil Standar, indikator serta acuan yang berlaku sama antar wilayah tanpa ada perbedaan. Maka dari itu dengan tidak adanya perbedaan perlakuan untuk semua wilayah, maka penggunaan bahan material kecuali dikarenakan faktor dari kondisi alam.</p>
	<p>Berorientasi kepada solusi dari kegiatan monitoring dan evaluasi dan pembahasan hasilnya harus bisa digunakan menjadi alat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada sehingga kedepannya akan terjadi peningkatan.</p>
	<p>Partisipatif dalam perumusan standar, indikator, acuan serta kegiatan monev hingga pembahasan hasil akhir harus dilakukan bersama-sama oleh pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi dan juga yang dimonitoring dan evaluasi dengan tujuan kegiatan tersebut bisa menjadi agenda bersama.</p>
	<p>Berjenjang, Monev sendiri dilakukan secara berjenjang berdasarkan dengan jabatan, kedudukan serta tingkat yang disandang seseorang, hal ini termasuk kedalam monitoring dan evaluasi structural dan diperlukan monitoring dan evaluasi fungsional.</p>
<p>Batho Pele dalam Public Service Commission 2008:34 dalam Astuti, Anisa Puji 2018</p>	<p>Prinsip berikut ini lebih kepada perspektif program layanan umum dan program pelayanan pemerintahan yang bisa dievaluasi :</p>
	<p>Konsultasi warga. Dikonsultasikan tentang bagaimana tingkat kualitas pelayanan public dari yang mereka terima dan sebisa mungkin diberikan pilihan terhadap layanan yang ditawarkan.</p>
	<p>Standar layanan warga. Warga harus diberitahu bagaimana tingkat serta kualitas layanan public yang mereka terima sehingga mereka sadar bagaimana yang diharapkan.</p>
	<p>Mengakses semua. Warga negara harus mempunyai akses yang sama terhadap pelayanan yang mereka berhak akses.</p>
	<p>Kesopanan. Warga semestinya diperlukan secara sopan dengan penuh pertimbangan.</p>

	Informasi. Warga harus mendapatkan informasi yang akurat dan penuh tentang pelayanan masyarakat yang berhak mereka terima.
	Keterbukaan dan Transparansi. Warga atau masyarakat diberikan informasi program yang dijalankan.
	Memperbaiki. Jika standar pelayanan yang sudah dijanjikan tidak disampaikan maka harus ada permintaan maaf dan perbaikan serta dengan penjelasan yang lengkap, cepat dan juga efektif. Ketika ada keluhan dari warga maka harus ada respon yang positif.
	Nilai untuk Uang. Pelayanan public harus disediakan secara ekonomis dan juga efisien dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik untuk warga masyarakat dengan nilai uang yang dalam batas wajar.

### c. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Tujuan Monitoring dan Evaluasi menurut Shapiro dalam Mulyono 2007:224 dalam Astuti, Anisa Puji 2018. Shapiro berpendapat bahwa Monitoring dan Evaluasi memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Monitoring dan Evaluasi digunakan sebagai sarana untuk menyediakan informasi bagi keseluruhan tingkatan manajemen.
- b. Mengetahui bagaimana implementasi dari suatu program yang juga sebagai bagian dari akuntabilitas.
- c. Mengukur bagaimana outcome dan impact dari keluaran suatu program atau proyek.
- d. Menggugah pemahaman dan juga pelajaran yang cukup mendalam untuk diaplikasikan pada tindak lanjut dari suatu implementasi program atau proyek.

Tujuan Evaluasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (3) bahwa evaluasi dilakukan dengan maksud atau tujuan untuk dapat

mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Adapun fokus utama pada evaluasi diarahkan pada :

1. Keluaran (outputs)
2. Hasil (outcomes)
3. Dampak (impact)

Dari pelaksanaan rencana pembangunan. Maka dari itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel harus disertai dengan penyusunan indikator kerja pelaksanaan rencana yang meliputi :

- a. Indikator masukan
- b. Indikator keluaran
- c. Indikator hasil/manfaat

**d. Tipe Evaluasi**

Dikutip dari Laksmi Nurita Tanjung (2018) bahwa dalam melakukan sebuah evaluasi suatu program/proyek atau kegiatan dapat menggunakan tujuh tipe untuk evaluasi yaitu :

1. Kinerja Penilaian Rantai Logika
2. Penilaian Pra-pelaksanaan
3. Evaluasi Proses Implementasi
4. Kajian cepat
5. Studi Kasus

## 6. Evaluasi Dampak

## 7. Evaluasi Meta

Dengan adanya panduan untuk evaluasi yang menggunakan tujuh tipe evaluasi bisa mempermudah dalam melakukan evaluasi sebuah program/proyek atau kegiatan. Penelitian ini akan menggunakan evaluasi Kinerja Rantai Logika karena tipe evaluasi ini bisa digunakan untuk penentuan kekuatan dan logic dari model kausal pada sebuah program, proyek ataupun kebijakan dengan tujuan sebuah program atau proyek yang sudah berjalan bisa terlaksana dengan baik untuk dilanjutkan serta dapat mempermudah prosesnya. Cara kerja model kausal ini dengan menunjukkan penyebaran dan urutan kegiatan, sumberdaya atau inisiatif kebijakan. Proses yang sudah ditetapkan oleh model kausal cukup baik karena dalam model kausal melakukan penyebaran dan juga urutan kegiatan dan dengan cara model kausal bisa mempermudah perubahan yang diinginkan, selain itu sistem evaluasi kinerja rantai logika ini bisa menunjukkan dalam tercapainya perubahan yang diinginkan berdasarkan usaha dan riset dan tipe ini dapat menghindari kegagalan dari desain yang lemah serta kemungkinan kecil untuk tidak sama sekali dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dan evaluasi kinerja ini menilai sebuah kinerja, program, proyek sesuai dengan tujuan atau standar yang sudah ditentukan sebelumnya.

## 2. Program

Definisi Program menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Rancangan Mengenai asas serta usaha dalam hal ketatanegaraan, perekonomian, dan lain-lain.

Menurut Muhaimin, Sutiah, Sugeng Listyo Prabowo (2009) dalam J Andersen (2014). Mendefinisikan program sebagai pernyataan yang berisi tentang kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan juga saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Program biasanya mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama dengan sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi dan semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan dan berurutan.

Program menurut Jones 1984 (dalam MA Cakrawijaya 2013). Program merupakan sebuah cara yang disahkan untuk mencapai suatu tujuan dalam pengertian Program menurut Jones itu sendiri bahwa program sebuah penjabaran dari langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu sendiri.

Dikutip dari Shalfiah. R (2017), Program dijelaskan lebih mendalam menurut Charles O. Jones (1996:294) yaitu program didefinisikan sebagai cara yang disahkan untuk mencapai sebuah tujuan, dan program yang terbaik di dunia adalah program yang berdasarkan pada model teoritis yang cukup jelas. Sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diselesaikan dan mulai melakukan intervensi, maka sebelum itu harus ada sebuah pemikiran yang cukup serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu bisa terjadi dan apa yang bisa menjadikan solusi terbaik untuk masalah tersebut (Jones 1996:295).

**a. Karakteristik Program Menurut Charles O. Jones (1996:294)**

Karakteristik Program menurut Charles O. Jones ini membantu kita untuk mengidentifikasi bahwa sebuah kegiatan tersebut bisa dikategorikan sebagai program atau bukan program, karakteristik tersebut yaitu :

1. Program biasanya cenderung membutuhkan sebuah staf untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Sebuah program biasanya memiliki anggaran sendiri, sebuah program juga bisa diidentifikasi melalui sebuah anggaran.
3. Sebuah program memiliki suatu identitas sendiri yang apabila berjalan secara efektif dapat diakui oleh public.

**3. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)**

PUPM atau kepanjangan dari Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat merupakan kegiatan atau program pemberdayaan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) yang terdiri dari gabungan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Poktan (Kelompok Tani), lembaga usaha masyarakat yang bergerak pada bidang pangan, dan industry/produsen/distributor bahan pangan untuk melayani TTI (Toko Tani Indonesia), Toko Tani Pusat atau yang disebut Toko Tani Indonesia Centre dan Toko Tani Indonesia sendiri biasanya terdapat di daerah atau Kabupaten/kota dalam hal penyediaan pangan pokok dan strategis untuk masyarakat. Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Sendiri dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian sejak tahun 2016 selain itu pada tahun 2017 telah dikembangkan sejumlah 898 Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang memasok bahan



pangan ke 2000 Toko Tani Indonesia di Kabupaten dan Kota di 32 Provinsi yang mengalami ketidak stabilan harga dan juga pasokan pangan pokok strategis (Kementrian Pertanian. 2017a dalam Sarastuti, S., Ahmad, U., Sutrisno, S. 2018)

**a. Tujuan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)**

Dikutip dari website Badan Ketahanan Pangan dan Pertanian ([bkp.pertanian.go.id](http://bkp.pertanian.go.id)) tujuan dari Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat adalah untuk menyerap Produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan petani khususnya bahan pangan pokok strategis serta mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis dan Memberikan kemudahan akses konsumen dan masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis yang berkualitas dengan harga yang wajar.

**4. Ketahanan Pangan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan *Pangan* sesuai Pasal 1 Ayat 1 sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Sedangkan definisi *Ketahanan Pangan* sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 4 adalah kondisi

terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan peorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, berizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan Pangan menurut Food and Agricultural Organization (FAO) dalam Nurhemi *et al* (2014) dalam Prasetyo, Dewo Eko (2018) mendefinisikan Ketahanan pangan dengan situasi dimana pada saat semua orang dalam segala waktu yang mereka miliki dengan kecukupan jumlah atas pangan yang aman, bergizi demi kehidupan yang lebih sehat dan aktif.

#### **a. Aspek - aspek yang membentuk ketahanan pangan**

Dikutip dari Pebrian, Dheavivi Ayu Dian (2018), Menurut Badan Ketahanan Pangan (2015) ada sekitar empat aspek utama yang membentuk ketahanan pangan itu sendiri, aspek tersebut adalah :

##### **1. Ketersediaan Pangan**

Tersedianya pangan secara fisik di daerah yang didapatkan dari produksi domestic, impor maupun bantuan pangan yang ketersediaanya lebih diutamakan dari produksi domestic.

##### **2. Akses Pangan**

Kemampuan sebuah rumah tangga dalam mendapatkan kecukupan pangan, baik itu diperoleh dari produksi sendiri atau diperoleh dari pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan.

### 3. Penyerapan Pangan

Hal ini dilihat dari penggunaan akan pangan oleh sebuah anggota keluarga di masyarakat.

## G. Definisi Konseptual

Konsep adalah suatu gambaran mengenai masalah yang belum diselesaikan dan keadaan lingkungan yang akan diteliti, menjadikan fokus utama untuk pusat perhatian ilmu sosial. Konsep dalam penelitian ini adalah :

### 1. Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Monitoring dan evaluasi PUPM melalui toko tani Indonesia dilakukan guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan PUPM dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan stabilitas pasokan dan harga pangan. Monev sendiri dilakukan dilakukan secara berkala dan berjenjang.

### 2. Toko Tani Indonesia

Konsep dari Toko Tani Indonesia sendiri sebagai penyedia bahan pangan pokok untuk dijual ke masyarakat, Toko Tani Indonesia sendiri memiliki Toko Tani Indonesia Centre (TTIC) sebagai pusat dari penyedia bahan pangan pokok, selain Toko Tani Indonesia Centre di berbagai daerah juga terdapat Toko Tani Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok disetiap daerah Kabupaten/Kota untuk penyedia bahan pangan pokok strategis. Toko Tani Indonesia Centre maupun Toko Tani Indonesia yang berada di daerah disupply oleh Lembaga Usaha Pangan masyarakat yang

terdiri dari Gabungan Kelompok tani, Kelompok Tani dan lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan untuk menjual atau memasukan produk bahan pangan pokok ke Toko Tani Indonesia Centre maupun Toko Tani Indonesia yang berada di daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya akan dijual kepada masyarakat dengan harga yang stabil.

### 3. Ketahanan Pangan

Konsep ketahanan pangan adalah terpenuhinya bahan pangan maupun pangan baik secara jumlah, mutu, keamanan, keragaman dan gizi bagi negara dan masyarakat dilihat dari aspek ketersediaan pangan, aspek fisik dan ekonomi, aspek stabilitas dan aspek pemanfaatan pangan itu sendiri.

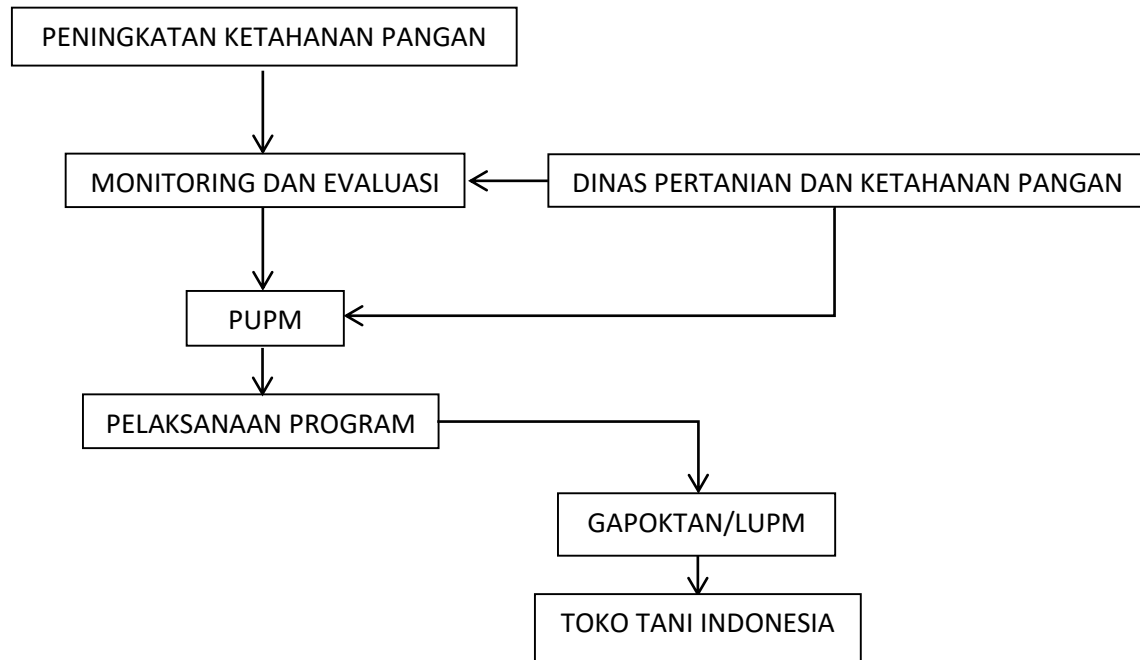
## **H. Definisi Operasional**

Definisi Operasional merupakan penentuan konstrak dan sifat yang akan dipelajari untuk menjadi variable yang dapat diukur. Definisi operasional sendiri menjelaskan cara-cara tertentu untuk digunakan sebagai penelitian dan mengoperasikan konstrak. Dengan ini memungkinkan peneliti yang lain dapat melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama dan mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik (Sugiyono 2012:31).

**Tabel 3**  
**Tabel Definisi Operasional**

Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	Menilai persiapan pihak terkait terhadap program melalui Sosialisasi, koordinasi, advokasi dengan pihak yang terkait dalam pelaksanaan program PUPM. Menilai berjalanya program PUPM melalui pembinaan, pendampingan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, pelaporan dari pihak yang terkait ketahanan pangan dan program PUPM.
	Menilai hasil atau dampak dari berjalannya program PUPM melalui kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah, kesesuaian target capaian dengan realisasi.
PUPM melalui TOKO TANI INDONESIA	Mejaga harga-harga pada tingkat tingkat produsen
	Memutus rantai pasok yang tidak efisien
	Menekan harga pada tingkat konsumen
	Mengurangi keuntungan pedagang perantara (Middleman)
	Merubah struktur pada pasar
Ketahanan Pangan	Ketersediaan
	Akses
	Penyerapan

## I. Kerangka Pikir Penelitian



**Gambar 1**  
**Kerangka Pikir Penelitian**

## J. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang ilmiah untuk mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud adalah kegiatan penelitian yang didasarkan kepada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris dan sistematis menurut Sugiyono (1999:1). Metode Penelitian pada dasarnya merupakan sebuah cara yang ilmiah untuk memperoleh sebuah data yang valid dengan tujuan dapat dibuktikan, ditemukan, dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada saatnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono 2011:2). Pemilihan metode penelitian yang tepat sesuai untuk mencapai sebuah karya ilmiah, penulis berminat untuk melakukan penelitian terhadap sebuah program dan fakta terkait

judul yang diteliti, maka penelitian yang diangkat oleh penulis menggunakan metode sebagai berikut.

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan mix methods, yaitu metode penelitian yang mengkombinasikan dua bentuk metode penelitian, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, reliable, objektif, valid (Sugiyono, 2011).

Jenis penelitian mix method menurut Cresswell (2010) memiliki tiga bagian strategi, yaitu :

##### 1) Strategi ekplanatoris sekuensial

Tahap pertama dalam strategi ini dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti dengan pengumpulan dan analisa yang dibangun berdasarkan hasil awal kualitatif. Prioritas diberikan kepada data kuantitatif.

##### 2) Strategi eksploratoris sekuensial

Tahap pertama dalam strategi ini dengan mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dan diikuti pengumpulan data kuantitatif dan menganalisisnya pada tahap kedua yang berdasarkan pada hasil dari tahap pertama. Prioritas diberikan kepada data kualitatif.

### 3) Strategi transformative sekuensial

Strategi ini menggunakan perspektif teori untuk membuat prosedur tertentu dalam penelitian. Strategi ini peneliti bisa memilih menggunakan salah satu dari dua strategi yang sudah disebutkan diatas untuk tahap pertama dan memberikan prioritas untuk salah satu dari kedua datanya.

Penelitian ini menggunakan mix method dengan Strategi eksploratoris sekuensial, untuk tahapan pertama mengumpulkan dan menganalisa data kualitatif, yaitu dengan wawancara kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes untuk mengetahui monitoring dan evaluasi program usaha pangan masyarakat melalui toko tani Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Brebes tahun 2019.

Dengan melihat dan memperhatikan beberapa faktor dalam penelitian diantaranya seperti Kesiapan pihak terkait dalam menjalankan program tersebut, proses dalam implementasi program tersebut, kendala, hasil, dampak dan pengaruh dari program tersebut terhadap sasaran tujuan dari program tersebut dan kesesuaian antara tujuan awal dibentuknya program tersebut dengan hasil akhir dari program yang sudah berjalan.

Selanjutnya menyebarkan kuesioner kepada Gapoktan dan TTI sebagai penerima program PUPM untuk menganalisis data kuantitatif untuk mengetahui hasil dan pengaruh dari program PUPM tersebut.



## **b. Objek/Subjek Penelitian**

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat dan nilai dari orang bisa juga objek dan kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiyono (2011:38). Penulis menggunakan Objek Penelitian Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Sedangkan subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang bisa diperoleh keterangan darinya menurut amirin (1986). Dengan kata lain subjek penelitian sendiri adalah sumber informan dari data yang ingin diperoleh oleh penulis/peneliti. Subjek penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai informan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, Gapoktan/Toko Tani Indonesia yang berada di daerah Kabupaten Brebes

## **c. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Program PUPM melalui Toko Tani Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Brebes tahun 2019.

### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal dari sumber aslinya atau sumber pertama, melalui orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sumber dan sarana mendapatkan informasi menurut Umi Narimawati (2008:98).

**Tabel 4**  
**Data Primer**

Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan
Mekanisme Monitoring dan Evaluasi program PUPM melalui Toko Tani	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes	Wawancara
Implementasi Program PUPM melalui Toko Tani	Gapoktan/TTI	Kuesioner

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya menurut Uma Sekarang (2011).

**Tabel 5**  
**Data Sekunder**

Data	Sumber Data
Laporan monitoring dan evaluasi program PUPM tahun 2019	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes sebagai instansi yang terkait monitoring dan evaluasi program PUPM
Data Toko Tani Indonesia/Gapoktan wilayah Kabupaten Brebes yang tergabung dalam program PUPM	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes
Jurnal, Artikel, Berita dan data pendukung yang terkait dengan program PUPM	Berbagai Sumber

**d. Teknik Pengumpulan data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik *sampling* jenuh. Teknik *sampling* jenuh merupakan teknik penentuan sampel dengan

menjadikan semua anggota populasi sebagai sebagai sampel (Sugiyono, P., 2014). Teknik ini adalah teknik sampling non random yang menentukan kriteria untuk pengambilan sampelnya dimaksudkan agar sesuai pada tujuan dan bisa memecahkan kasus yang diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Wawancara

Wawancara adalah proses mengumpulkan data atau memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber kemudian jawaban dari responden dan narasumber bisa dicatat atau direkam menggunakan alat perekam menurut Sugiyono (2012). Dalam hal ini wawancara akan dilakukan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes guna memperoleh data terkait Monitoring dan Evaluasi Program PUPM melalui toko tani Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Brebes pada tahun 2019.

2) Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, P., 2012). Kuesioner akan diberikan kepada Gapoktan/LUPM/TTI yang berada di Kabupaten Brebes sebagai penerima program guna mengetahui bagaimana program itu berjalan serta mengetahui hasil dari program tersebut.

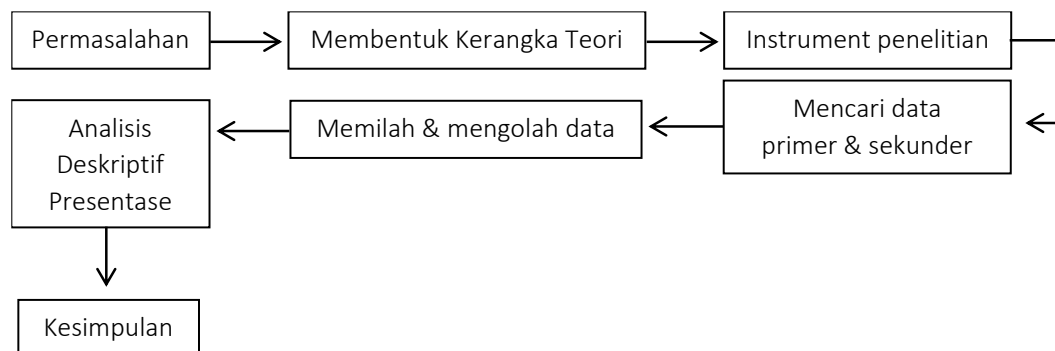
### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa yang sudah terjadi atau berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto gambar hidup dan lain-lain menurut Sugiyono (2011:329-330). Dengan ini maka penulis mencari data untuk penelitian dengan dokumentasi yang berkaitan dengan Monitoring dan evaluasi program PUPM melalui toko tani Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Brebes tahun 2019.

#### e. Teknik Analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Deskriptif Presentase.

Adapun Alur dalam teknik Analisis data sebagai berikut ini.



**Gambar 2**  
**Alur Teknis Analisis Data**

Peneliti ini menggunakan skala Linkert, menurut Sugiyono (2010), skala linkert digunakan untuk mengukur sebuah sikap, pendapat, persepsi fenomal

sosial. Peneliti memberikan lima pilihan jawaban kepada responden dengan skala 1 sampai 5 untuk dijawab seperti yang ada di bawah ini :

**Tabel 6**  
**Skala Linkert**

<b>Skala Linkert</b>	<b>Skor</b>
Sangat setuju	5
Setuju	4
Cukup	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Dari data kuesioner yang merupakan data kuantitatif akan dianalisis secara deskriptif presentase, menurut Riduan (2004), cara untuk menganalisis secara deskriptif presentase adalah :

- a. Menghitung nilai responden
- b. Merekap nilai
- c. Menghitung nilai rata-rata
- d. Menghitung presentase menggunakan rumus :

$$DP = \frac{n}{N} \times 100$$

Keterangan :

$DP$  = Deskripsi Presentasi (%)

$n$  = Skor yang diperoleh

$N$  = Skor ideal untuk masing-masing pertanyaan

Menentukan jenis deskriptif presentase yang sudah diperoleh masing-masing indikator dalam variable dan perhitungan deskriptif presentase kemudian diterjemahkan kedalam kalimat.

e. Cara menentukan tingkat kriteria sebagai berikut :

1. Menentukan angka presentase tertinggi skor maksimal  $\times 100\%$

$$\text{Skor maksimal } \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

2. Menentukan angka presentase terendah skor minimal  $\times 100\%$

$$\text{Skor minimal } \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

$$\text{Rentang} = 100\% - 20\%$$

$$\text{Panjang kelas interval} = 80\% : 5 = 16\%$$

Dengan panjang kelas interval 16% dan persentase terendah 20%, untuk mengetahui tingkatan kriteria, selanjutnya skor yang diperoleh dengan analisis deskriptif persentase dengan kriteria berikut ini :

**Tabel 7**  
**Kriteria Analisis Deskriptif Presentase**

<b>NO.</b>	<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
1.	84%-100%	Sangat Berhasil
2.	68%-84%	Berhasil
3.	56%-68%	Cukup berhasil
4.	36%-56%	Tidak berhasil
5.	20-36%	Sangat tidak berhasil